

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PROVINSI JAWA BARAT

Anah Furyanah¹⁾ & Sulistiyani¹⁾

1.2) dosen universitas pamulang, email : anahfuryanah@yahoo.co.id

ARTICLES INFORMATION

ABSTRACT

JURNAL SEKURITAS
(Saham, Ekonomi, Keuangan
dan Investasi)

Vol.2, No.3, Mei 2019

Halaman : 130 – 145
© LPPM & Prodi Manajemen
UNIVERSITAS PAMULANG

ISSN (online) : 2581-2777
ISSN (print) : 2581-2696

Keyword :

EPS, DPS, Stock Price, and
Sector Contructions
Company.

JEL. classification :

C33, G20, G23, N65

Contact Author :

PRODI MANAJEMEN UNPAM
Jl. Surya Kencana No.1 Pamulang
Tangerang Selatan – Banten
Telp. (021) 7412508, Fax (021) 7412491
Email :
jurnalfinance.unpam@gmail.com

Adapan Tujuan Penelitian Menganalisis pengaruh pertumbuhan industri terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap penyerapan teaga kerja di Jawa Barat. Menganalisis pengaruh pertumbuhan industri dan desentralisasi fiskal secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja.

Metode analisis yaitu estimasi model regresi dengan penggunaan data time series. Lokasi penelitian berada di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini adalah pertumbuhan industry berpengaruh secara parsial terhadap penyerahan tenaga kerja. Desentralisasi fiskal berpengaruh secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Pertumbuhan industri dan desentralisasi fiskal berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Research Objectives Analyze the influence of industrial growth on employment in West Java Province. Analyzing the effect of fiscal decentralization on the absorption of workforce in West Java. Analyze the influence of industrial growth and fiscal decentralization together on employment.

The analytical method is the estimation of the regression model with the use of time series data. The research location is in West Java Province. The results of this study are that industrial growth has a partial effect on labor surrender. Fiscal decentralization has a partial effect on employment in West Java. Industrial growth and fiscal decentralization have a simultaneous and significant effect on employment.



A. Pendahuluan

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Peranan Sektor Industri dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dapat ditelusuri dari kontribusi masing-masing subsektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau terhadap produk domestik bruto. Pada negara-negara berkembang, peranan sektor industri menunjukkan kontribusi yang semakin tinggi. Peran sektor industri pada pembentukan PDRB Jawa Barat cukup tinggi dan mengalami peningkatan pada tahun 2014. Dengan berkembangnya sektor industri, aktivitas di sektor- sektor lain akan turut meningkat. Karena sektor industri membutuhkan pasokan bahan baku baik dari sektor pertanian maupun dari sektor lainnya, termasuk hasil dari sektor industri itu sendiri.

Hampir 60 persen industri pengolahan di Indonesia berlokasi di Jawa Barat. Dari 74 kawasan industri yang tersebar di Indonesia, 40 industri terletak di Jawa Barat. Lokasi kawasan industri di Jawa Barat yang akan dikembangkan antara lain di Kabupaten Karawang, Purwakarta, Majalengka, dan Bekasi namun bukan menjadi prioritas nasional untuk dikembangkan (Pengembangan Reguler), BPS Jawa Barat 2015.

Pada akhir tahun 2010 tercatat terdapat 6.029 perusahaan/industri besar dan sedang. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 perkembangan industri besar dan sedang yang tercatat dalam direktori industri di Jawa Barat mengalami tren meningkat, hanya pada tahun 2011 terjadi penurunan jumlah industri besar dan sedang yaitu tercatat turun sebesar 2,79 persen dari tahun 2010 menjadi 5.861 perusahaan/usaha. Selanjutnya pada tahun 2012 sampai dengan 2014 jumlah industri besar dan sedang terus mengalami peningkatan, dan peningkatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yakni meningkat sebesar 6,69 persen dari tahun sebelumnya atau meningkat sebanyak 405 perusahaan. Pada tahun 2014 jumlah industri besar dan sedang di Jawa Barat sudah berkembang menjadi 110,02 persen dari kondisi pada tahun 2010.

Table.1. Jumlah Perusahaan Industri di Jawa Barat (2010-2014)

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Perusahaan	6.029	5.861	6.052	6.457	6.633
Indek Perkembangan(%)	100	97,21	103,38	107,10	110,02
Pertumbuhan (%)		-2,79	3,26	6,69	2,73

Sumber : Statistik Industri Besar dan Sedang Jawa Barat 2014.

Suatu daerah dianggap maju jika kelompok sektor sekunder menjadi penopang bingkai perekonomiannya. Industri manufaktur merupakan salah satu penopang perekonomian yang dianggap tangguh. Keberadaan dan keberlanjutan industri manufaktur memegang peranan yang kuat karena mengakar di masyarakat. Sektor industri manufaktur, baik Industri Besar Sedang (IBS) maupun Industri Mikro Kecil (IMK) perannya tidak begitu besar dalam pembentukan ekonomi daerah, namun berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Jumlah unit usaha di sektor industri besar dan menengah Jawa Barat tahun 2013 terbesar adalah di Kabupaten Sukabumi yaitu 15.782 perusahaan, sementara penyerapan tenaga kerja terbesar adalah di Kabupaten Karawang yaitu 405.246 orang tenaga kerja, BPS Jawa Barat, 2015.

Pada akhir tahun 2014 terdapat sekitar 1.545.457 orang yang bekerja di perusahaan industri besar dan sedang di Jawa Barat. Jumlah tersebut sudah termasuk pekerja sektor produksi yaitu pekerja yang langsung bekerja di dalam proses produksi dan pekerja administrasi dan penunjang lainnya yaitu pekerja selain pekerja produksi

seperti pimpinan perusahaan, staf direksi, pegawai administrasi, keuangan, pemasaran, kebersihan dan lain sebagainya.

Tabel 2. : Banyaknya Pekerja Industri di Jawa Barat 2010 – 2014

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014
Pekerja	1.269.108	1.325.532	1.427.004	1.458.467	1.545.457
Indeks Perkembangan (%)	100	104.45	112.44	114.92	121.78
Pertumbuhan (%)		4.45	7.66	2.20	5.96

Sumber : Statistik Industri Besar dan Sedang Jawa Barat 2014, buku 2

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan industri besar dan sedang dari tahun 2010 hingga tahun 2014 menunjukkan trend terus meningkat. Bahkan pada tahun 2014 jumlah tenaga kerja yang terserap industri besar dan sedang mencapai 121,78 persen dibandingkan kondisi tahun 2010, yakni sebesar 1.545.457 orang pekerja.

Berdasarkan kebijakan pemerintah tentang desentralisasi fiskal pasti akan membuka peluang untuk masing-masing daerah untuk mandiri sehingga akan lebih maksimal dalam pengelolaan daerahnya sendiri. Hal ini akan membuka peluang usaha untuk masyarakat setempat dalam kaitannya dengan tenaga kerja setempat. Berbagai sektor akan berkesempatan untuk membuka peluang usaha dengan adanya dampak dari desentralisasi fiskal tersebut. Maka dengan banyaknya sektor usaha yang bergerak akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.

Menurut Badan Pusat Statistik (2011) dalam dua tahun terakhir, tingkat kemiskinan telah menurun relatif signifikan pada sebagian besar provinsi. Demikian pula, tingkat pengangguran di sebagian besar daerah telah mengalami penurunan yang relatif cukup signifikan. Di samping itu, dalam lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan pemerataan pembangunan daerah yang tercermin dari semakin membaiknya indikator statistik pemerataan PDRB antar provinsi.

Berdasarkan gambaran ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016, sektor industri ternyata masih memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Sektor Industri di Provinsi Jawa Barat didukung oleh berbagai hal termasuk letak yang sangat strategis, kekayaan alam yang luas dan beragam sehingga memberikan peningkatan nilai tambah ekonomi terhadap sektor industri yang ada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu dengan adanya desentralisasi fiskal maka kebijakan pengelolaan perekonomian dikelola maksimal oleh Provinsi Jawa Barat dan hal tersebut akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan sektor ekonomi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan industri dan desentralisasi fiskal memiliki peranan dalam upaya penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa barat. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengambil judul mengenai "Pengaruh Pertumbuhan Industri Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Barat".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan industri terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan industri dan desentralisasi fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh laju pertumbuhan industri terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.
2. Menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.
3. Menganalisis Pengaruh laju pertumbuhan industri dan desentralisasi fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.

D. Landasan Teori

1. Industri

Menurut Badan Pusat Statistika (2015) industri merupakan kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan perubahan barang jadi dan barang yang belum bernilai menjadi barang yang nilainya lebih dan layak. Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

2. Tenaga Kerja

Menurut Djojohadikusumo (Misbach, 2011) tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Untuk menggolongkan penduduk dalam golongan tenaga kerja atau bukan tenaga kerja, dapat dilihat dari kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Semua penduduk yang memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas bekerja dapat digolongkan dalam kelompok tenaga kerja.

3. Kesempatan Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), yang dimaksud dengan kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau instansi.

4. Penyerapan Tenaga Kerja

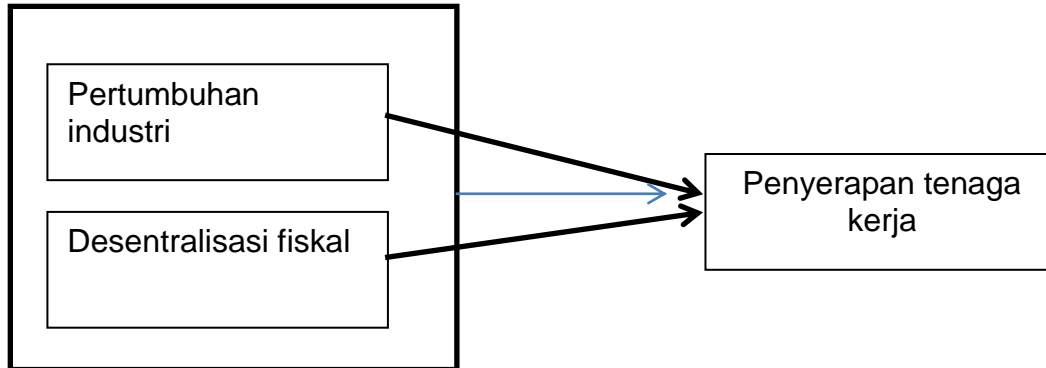
Menurut Todaro dikutip dalam Karib (2012) penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja.

5. Desentralisasi Fiskal

Penerapan otonomi dan desentralisasi fiskal ditandai dengan diberlakukannya U No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 pada 1 Januari 2001. Dalam perjalanannya kedua undang-undang tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yang kemudian diperbaiki oleh pemerintah melalui revisi undang-undang tersebut menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberlakukan pada bulan desember 2004 (RPJMN 2004-2009). Dalam UU No. 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah (pusat)

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambar 1 : kerangka konseptual



Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori, dan penelitian sebelumnya maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.
2. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.
3. Pertumbuhan industri dan desentralisasi berpengaruh positif secara bersama-sama secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.

E. Metodologi

1. Sampel dan Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, analisis data sekunder mengenai pengaruh pertumbuhan industri dan desentralisasi fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series yang meliputi 27 kabupaten/kota di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat dengan periode waktu yang diambil adalah 5 tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS Jawa Barat.

2. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisa informasi kuantitatif, yaitu estimasi model regresi dengan penggunaan data time series dan uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji f.

F. Hasil dan Pembahasan

1. Deskripsi Data

1) Data Pertumbuhan Industri

Pengelompokan kategori sektor industri manufaktur ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja di perusahaan industri tersebut, tanpa memperhatikan apakah perusahaan industri ini menggunakan mesin atau tidak serta tanpa memperhatikan besarnya modal atau aset perusahaan itu. Kategori usaha ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Kategori Indikator Usaha

Kategori	Jumlah Tenaga Kerja
Besar Sedang Kecil Rumah Tangga	100 orang atau lebih 20 s.d. 99 orang 5 s.d. 19 orang 1 s.d. 4 orang

Sumber: BPS Jawa Barat

Tabel 5.2 Golongan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Golongan	Deskripsi Sektor Industri Pengolahan
10	Industri Makanan
11	Industri Minuman
12	Industri Pengolahan Tembakau
13	Industri Tekstil
14	Industri Pakaian Jadi
15	Industri Kulit, Barang Dari Kulit, Dan Alas Kaki
16	Industri Kayu, Barang-Barang Dari Kayu (Tidak Termasuk Furnitur), Dan Barang-Barang Anyaman Dari Rotan, Bambu, Dan Sejenisnya
17	Industri Kertas, Barang Dari Kertas
18	Industri Pencetakan Dan Reproduksi Media Rekaman
19	Industri Produk Dari Batu Bara Dan Pengilangan Minyak Bumi
20	Industri Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia
21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional
22	Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik
23	Industri Barang Galian Bukan Logam
24	Industri Logam Dasar
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya
26	Industri Komputer, Barang Elektronik Dan Optik
27	Industri Peralatan Listrik
28	Industri Mesin Dan Perlengkapannya Ytdl
29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi Trailer
30	Industri Alat Angkutan Lainnya
31	Industri Furnitur
32	Industri Pengolahan Lainnya
33	Jasa Reparasi Dan Pemasangan Mesin Dan Peralatan

Sumber: BPS Jawa Barat

Perkembangan industri besar dan sedang yang tercatat dalam direktori industri di Jawa Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami tren peningkatan. Pada akhir tahun 2011 tercatat terdapat 5.861 perusahaan/usaha industri besar dan sedang. Peningkatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yakni dimaksud merupakan selisih antara perusahaan yang baru berdiri dan perusahaan yang baru tutup atau berubah kategori dari usaha industri besar/średang menjadi industri kecil pada tahun survei tersebut dilaksanakan. meningkat sebesar 6,69 persen dari tahun

sebelumnya atau meningkat sebanyak 405 perusahaan. Pada tahun 2015 jumlah industri besar dan sedang di Jawa Barat sudah berkembang 17,28 persen dari kondisi pada tahun 2011 menjadi 6.874 perusahaan.

Tabel 5.3. Jumlah Perusahaan Industri di Jawa Barat 2012-2016

Tahun	Jumlah Perusahaan	Pertumbuhan (%)
2011	5861	-
2012	6052	3,26
2013	6457	6,69
2014	6633	2,73
2015	6874	3,63
2016	6633	-3,5

Sumber: BPS Jawa Barat

2) Data Desentralisasi Fiskal

Penerimaan daerah dalam struktur laporan keuangan terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah dimana pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada penelitian ini data desentralisasi fiskal dibatasi hanya pada data pendapatan Asli daerah yang menjadi acuan dalam uji statistik.

Penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berasal dari Pendapatan Daerah bila dibandingkan secara series dalam periode tahun 2012-2016* mengalami pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2012 pendapatan Pemerintah sampai tahun 2014 meningkat lagi menjadi Rp. 22.310,95 milyar. Tahun 2015 pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencapai Rp. 23.814,83 milyar. Jika dilihat dari lajunya, maka laju pertumbuhan pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun 2015 adalah laju paling rendah. Walaupun lajunya melambat, namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu tumbuh sebesar 6,74 persen di tahun 2015.

Dalam APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2016 dianggarkan pendapatan daerah sebesar Rp. 26.806,86 milyar mengalami kenaikan 12,56 persen dibandingkan realisasi pendapatan daerah tahun 2015. Kenaikan ini mengartikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat, merasa optimis dengan menganggarkan pendapatan daerah dalam APBD 2016 yang lebih besar dari realisasi pendapatan pada tahun 2015. Kondusifnya kondisi Jawa Barat secara keseluruhan sangat mendukung tingkat kepercayaan pemerintah dalam upaya penggalan potensi daerah.

Tabel 5.4. Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Jawa Barat 2012-2016 (dalam Ribuan)

Jenis Penerimaan	Provinsi Jawa Barat				
	2012	2013	2014	2015 *)	2016 *)
Receipt Items	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
A PENDAPATAN DAERAH	16.878.128.995,00	19.237.611.310,00	22.310.953.031,23	23.814.831.622,95	26.806.857.280,96
Local Government Revenue					
1 Pendapatan Asli Daerah	9.982.917.415,00	12.360.109.870,00	15.038.153.309,92	15.837.707.187,07	16.180.205.531,87
Original Local Government Revenue					

			11			
1.1	Pajak Daerah <i>Local Taxes</i>	9.149.214.330,00	236.145.855,00	13.753.760.402,65	14.617.071.393,16	14.930.507.754,94
1.2	Retribusi Daerah <i>Local Retributions</i>	57.326.324,00	63.654.936,00	70.081.405,58	73.404.322,72	66.269.808,22
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Government Corporate and Management of Separated Reg. Government Wealth</i>	232.647.377,00	261.601.089,00	304.380.444,82	281.661.628,12	310.065.559,46
1.4	Lain-lain PAD yang Sah <i>Other Original Local Government Revenue</i>	543.729.384,00	798.707.990,00	909.931.056,87	865.569.843,07	873.362.409,25
2	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	2.832.746.609,00	2.950.532.546,00	3.260.505.636,02	2.506.877.511,84	10.594.918.220,73
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Tax Share/Non Taxe/Natural Resources</i>	1.514.429.569,00	1.398.007.485,00	1.494.604.220,02	1.184.319.132,84	1.600.468.149,73
2.2	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1.269.960.760,00	1.472.453.011,00	1.687.686.386,00	1.303.654.355,00	1.247.045.751,00
2.3	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	48.356.280,00	80.072.050,00	78.215.030,00	18.904.024,00	7.747.404.320,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah <i>Other Legal Revenue</i>	4.062.464.971,00	3.926.968.894,00	4.012.294.085,29	5.470.246.924,04	31.733.528,37
B	PEMBIAYAAN DAERAH <i>Local Government Financing</i>	3.003.186.59,00	2.934.630.844,00	3.494.683.941,80	4.551.871.624,71	2.600.000.000,00



	JUMLAH/Total	19.881.315. 554,00	22.172.242.1 54,00	25.805.636.973,0 3	28.366.703.247, 66	29.406.857.28 0,96
*)	Data APBD					

Sumber: BPS Jawa Barat

Pada periode awal realisasi pendapatan daerah tumbuh positif sebesar 52,69 persen, sedangkan di tahun 2015 hanya tumbuh 10,35 persen. Demikian pula dengan pendapatan asli daerah (PAD). Laju PAD Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun 2015 adalah laju terendah yaitu 5,32 persen. Demikian pula dengan PAD Jawa Barat tahun 2016 diperkirakan hanya tumbuh 2,16 persen

3) Data Penyerapan Tenaga Kerja

Tabel 5.5. Data penyerapan Tenaga Kerja

Tahun	Pekerja	Indeks Perkembangan %	Pertumbuhan %
2011	1.325.532	100	-
2012	1.427.004	107,66	7,66
2013	1.458.467	110,03	2,20
2014	1.545.457	116,59	5,96
2015	1.588.155	119,81	2,76
2016	1.722.663	128,28	8,47

Sumber : BPS Jawa Barat

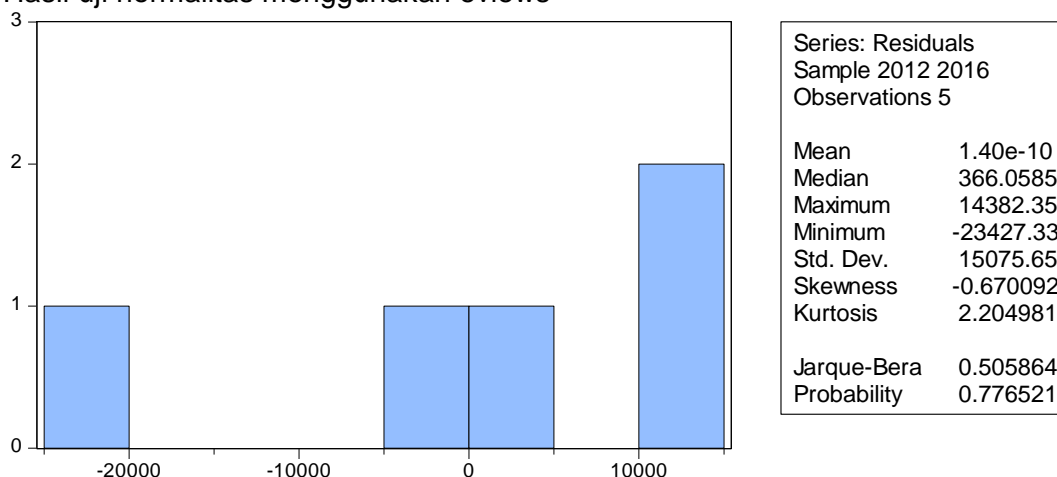
Jumlah tersebut sudah termasuk pekerja sektor produksi yaitu pekerja yang langsung bekerja di dalam proses produksi dan pekerja administrasi dan penunjang lainnya yaitu pekerja selain pekerja produksi seperti pimpinan perusahaan, staf direksi, pegawai administrasi, keuangan, pemasaran, kebersihan dan lain sebagainya.

a) Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan eviews



Sumber: Pengolahan data tahun 2018

Rumusan Hipotesis:

H0 : Data berasal dari populasi berdistribusi normal

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujian sebagai berikut.

- Tolak H0 apabila nilai probability < 0,05 berarti distribusi sampel tidak normal.
- Terima H0 apabila nilai probability > 0,05 berarti distribusi sampel adalah normal.

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 18 di atas, didapat angka probability untuk semua variabel yaitu 0,0776521 lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dengan kata lain distribusi data semua variabel adalah normal.

2) Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas menggunakan eviews

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.128736	Prob. F(2,2)	0.4698
Obs*R-squared	2.651188	Prob. Chi-Square(2)	0.2656
Scaled explained SS	1.088809	Prob. Chi-Square(2)	0.5802

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 09/13/18 Time: 01:26

Sample: 2012 2016

Included observations: 5

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45656.24	24309.34	1.878136	0.2011
PERTUMBUHAN_INDUSTRI	-2.181408	3.291925	-0.662654	0.5757
DESENTRALISASI_FISKAL	-1.38E-09	2.17E-09	-0.636293	0.5897
R-squared	0.530238	Mean dependent var	10676.38	
Adjusted R-squared	0.060475	S.D. dependent var	9208.364	
S.E. of regression	8925.583	Akaike info criterion	21.31494	
Sum squared resid	1.59E+08	Schwarz criterion	21.08060	
Log likelihood	-50.28735	Hannan-Quinn criter.	20.68600	
F-statistic	1.128736	Durbin-Watson stat	3.465083	
Prob(F-statistic)	0.469762			

Sumber: Pengolahan data tahun 2018

Adapun hipotesis yang akan diuji sebagai berikut.

H-0 : Tidak ada hubungan yang sistematis antara variabel yang menjelaskan dan nilai mutlak dari residualnya.

H1 : Ada hubungan yang sistematis antara variabel yang menjelaskan dan nilai mutlak dari residualnya.

Kriteria pengujian sebagai berikut. Apabila nilai Pro.Chi Square lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas di antara data pengamatan tersebut, yang berarti menerima H0, dan sebaliknya apabila nilai pro.chi square lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan terjadi heteroskedastisitas di antara data pengamatan tersebut, yang berarti menolak H0.

Berdasarkan ringkasan hasil perhitungan pada Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Pro.Chi Square hubungan antara variabel bebas dengan residual absolutnya 0,2656 jauh lebih besar dari 0,05, oleh karena itu H0 yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan residual absolutnya diterima. Hasil hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh tidak terdapat adanya heteroskedastisitas.

3) Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi menggunakan eviews

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.234308	Prob. F(1,1)	0.7130
Obs*R-squared	0.949147	Prob. Chi-Square(1)	0.3299

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 09/13/18 Time: 01:35

Sample: 2012 2016

Included observations: 5

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PERTUMBUHAN_IND				
USTRI	4.185314	13.22679	0.316427	0.8049
DESENTRALISASI_FI				
SKAL	-2.31E-09	8.13E-09	-0.283911	0.8239
C	1559.224	73984.88	0.021075	0.9866
RESID(-1)	-0.584826	1.208184	-0.484054	0.7130
R-squared	0.189829	Mean dependent var	1.40E-10	
Adjusted R-squared	-2.240682	S.D. dependent var	15075.65	
S.E. of regression	27139.03	Akaike info criterion	23.24590	
Sum squared resid	7.37E+08	Schwarz criterion	22.93345	
Log likelihood	-54.11474	Hannan-Quinn criter.	22.40731	
F-statistic	0.078103	Durbin-Watson stat	2.322897	
Prob(F-statistic)	0.962666			

Sumber: Pengolahan data tahun 2018

Untuk melakukan uji autokorelasi diperlukan adanya rumusan hipotesis sebagai berikut.

H0 : Tidak terjadi adanya autokorelasi di antara data pengamatan.

H1 : Terjadi adanya autokorelasi di antara data pengamatan.

Kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Kriteria pengujian apabila nilai statistik Durbin-Watson > DU maka dapat dinyatakan bahwa data pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,322897; nilai tersebut lebih besar dari DU= 1,40015, dengan demikian H0 dapat diterima dan menolak H1, sehingga dapat disimpulkan, bahwa tidak terjadi autokorelasi di antara data pengamatan.

4) Uji Multikolinieritas

Hasil Uji multikolonieritas menggunakan eviws

Variance Inflation Factors

Date: 09/13/18 Time: 01:38

Sample: 2012 2016

Included observations: 5

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
PERTUMBUHA			
N_INDUSTRI	61.83138	37.59251	1.645276
DESENTRALIS	2.67E-17	58.32203	1.645276

ASI_FISKAL
C 3.37E+09 37.08884 NA

Sumber: Pengolahan data tahun 2018

Untuk melakukan uji multikolinearitas diperlukan adanya rumusan hipotesis sebagai berikut.

H0 : Tidak terdapat hubungan antar variabel independen.

H1: Terdapat hubungan antar variabel independen.

Kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut.

Apabila nilai Centered VIF < 10 maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel independen, sebaliknya apabila nilai Centered VIF > 10 maka dinyatakan terjadi multikolinieritas diantara variabel independennya. Hasil analisis menunjukkan nilai Centered VIF untuk semua variabel $1,645276 < 10$ yang artinya H0 diterima Tidak terdapat hubungan multikolonieritas antar variabel independen

2. Uji Hipotesis (Regresi Linier Berganda)

Dependent Variable: PENYERAPAN_TENAGA_KERJA
Method: Least Squares
Date: 08/26/18 Time: 06:35
Sample: 2012 2016
Included observations: 5

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PERTUMBUHAN_INDUSTRI	40.01115	7.863293	5.088346	0.0365
DESENTRALISASI_FISKAL	2.23E-08	5.17E-09	4.316630	0.0497
C	947616.7	58066.78	16.31943	0.0037
R-squared	0.983405	Mean dependent var		1548349.
Adjusted R-squared	0.966810	S.D. dependent var		117027.4
S.E. of regression	21320.20	Akaike info criterion		23.05641
Sum squared resid	9.09E+08	Schwarz criterion		22.82207
Log likelihood	-54.64102	Hannan-Quinn criter.		22.42747
F-statistic	59.25910	Durbin-Watson stat		2.421501
Prob(F-statistic)	0.016595			

Sumber: Pengolahan data tahun 2018

Berdasarkan analisis dengan menggunakan Eviews diperoleh sebagai berikut.

1. Konstanta a sebesar 947616.7 dan koefisien b 1 = 40.01115; serta b 2 = 2.23E-08; sehingga persamaan regresi bergandanya menjadi : $\hat{Y} = 947616.7 + 40.01115X_1 + 2.23E-08X_2$. Konstanta a sebesar menyatakan 947616.7 bahwa jika tidak ada nilai variabel pertumbuhan industri dan desentralisasi fiskal ($X = 0$) maka rata-rata nilai penyerapan tenaga kerja sebesar 947616.7.
2. Koefisien regresi (b) untuk X1 sebesar 40.01115 berarti bahwa perubahan pada nilai variabel pertumbuhan industri (X1) sebesar satu point dan variabel independent lainnya tetap (dikontrol), maka tingkat variabel penyerapan tenaga kerja akan mengalami perubahan peningkatan sebesar 40.01115%
3. Koefisien regresi (b) untuk X2 sebesar 2.23E-08 perubahan pada nilai variabel desentralisasi fiskal (X2) sebesar satu point dan variabel independent lainnya tetap (dikontrol), maka tingkat variabel penyerapan tenaga kerja akan mengalami perubahan peningkatan sebesar 2.23E-08%.

Berdasarkan kedua variabel independen tersebut di atas dapat meningkatkan variabel dependennya karena besaran koefisien masing-masing bertanda positif.

Hasil dari Uji f diatas adalah untuk menguji hipotesis penelitian yang berbunyi sebagai berikut :

H0 : Tidak ada pengaruh pertumbuhan industri (X1) dan desentralisasi fiskal (X2) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) Provinsi Jawa Barat

H1 : Ada pengaruh pertumbuhan industri (X1) dan desentralisasi fiskal (X2) terhadap penyerapan tenaga kerja (Y) Provinsi Jawa Barat Ada pengaruh yang positif antara pertumbuhan industri terhadap penyerapan tenaga kerja dengan nilai thitung 5,088346 > ttabel sebesar 4.30265 dan probabilitasnya (sig.) 0,0365 < 0,05.

Ada pengaruh yang positif antara desentralisasi fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja dengan nilai diperoleh thitung 4.316630 > ttabel sebesar 4.30265 dan probabilitasnya (sig.) 0,0497 < 0,05.

Untuk menguji hipotesis tersebut dianalisis dengan menggunakan statistik F, dari hasil analisis data diperoleh Fhitung = 59.25910 dengan signifikansi (sig.) 0.016595, sedangkan Ftabel dengan derajat kebebasan (dk/df) untuk pembilang = 3 dan penyebut = 5 dan $\alpha = 0,05$ dari daftar tabel diperoleh = 4.30265 dengan demikian Fhitung > Ftabel atau 59.25910 > 4.30265 maka H0 ditolak dan menerima H1 yang menyatakan bahwa ada pengaruh.

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh koefisien korelasi multipelnya sebesar 0.983405 yang termasuk dalam kategori tingkat hubungan yang kuat atau dengan kata lain variabel penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh pertumbuhan industri dan desentralisasi fiskal 98,3405% dan sisanya sebesar 1,6595% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Pembahasan :

a. Pengaruh pertumbuhan industry terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa t hitung sebesar 5,088346 > t tabel sebesar 4.30265 dengan sig 0,0365 > 0,05 maka h0 ditolak dan h1 diterima yang berarti ada pengaruh yang positif antara pertumbuhan industri terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian ini berbeda sedikit dengan penelitian Agista dan retno (2016) yang berjudul "Pengaruh Pertumbuha Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Ponorogo". Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa industry formal tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan pertumbuhan industry non formal berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo dengan dibuktikan nilai t hitung yang tinggi sebesar 56,171. Penelitian tersebut dibedakan oleh kategori industry diklasifikasikan antara industry formal dan non formal seangkan dalam penelitian sekarang tidak dibedakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifatul Chusna 2013 dengan judul "Pengaruh Pertumbuhan Industri, Investasi, upah Terhadap penyerapan tenaga Kerja Sektor Industri Di Jawa Tengah Tahun 1980-2011" bertolak belakang dengan penelitian ini. Penelitian oleh Arifatul menyimpulkan bahwa pertumbuhan industry tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sector industry di Jawa Tengah. perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah lokasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah dimana Jawa Barat ini adalah lebih dekat dengan Ibu kota dimana dalam perluasan kota lebih dekat dan lebih mudah.

Menurut teori Keynes dalam Herawati dan Yoyok (2017) tentang permintaan agregat yang menyatakan bahwa "pentingnya pengeluaran agregat dalam rangka penyerapan tenaga kerja.jika terjadi kekurangan permintaan agregat, maka penyerapantenaga kerjapenuh tidak akan terjadi. Permintaan agregat yang dimaksud adalah pengeluaran terhadap barngdan jasa yang diproduksioleh perusahaan di dalam menentukan suatu kegiatan ekonomi. Dengan demikian jika

unit usaha semakin berkurang maka jumlah output yang diproduksi berkurang dan hal ini mempengaruhi penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja”.

b. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja

Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa t hitung sebesar 4,316630 > t tabel sebesar 4.30265 dengan sig 0,0497 > 0,05 maka H_0 ditolak dan H_2 diterima yang berarti ada pengaruh yang positif antara desentralisasi fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Siska 2011 yang berjudul “Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Dan Pengaruhnya Terhadap PDRB, Tenaga Kerja Dan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap PDRB Jawa Barat tetapi tidak signifikan terhadap tenaga kerja. Pada saat diluncurkannya desentralisasi fiskal masih banyak daerah yang belum siap karena masih dalam masa pemulihan dari pasca krisis tahun 1997/1998. Maka dari Jawa Barat pada tahun 2011 variabel desentralisasi fiskal masih sangat rendah pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja. Berbeda dengan penelitian sekarang ini yaitu adanya pengaruh signifikan dengan adanya desentralisasi fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat diindikasikan dengan sudah siap dan berkembangnya daerah Jawa Barat untuk melaksanakan kebijakan fiskal yang akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penelitian ini sesuai dengan teori desentralisasi fiskal Oates 1993 dalam Hadi Sasana 2009. Menurut Oates desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah subnasional/ pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang public. Pengambilan keputusan pada level pemerintahan local akan lebih di dengarkan untuk menganekaragamkan pilihan local dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Desentralisasi fiskal di Negara-negara berkembang apabila tidak berkembang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Desentralisasi fiskal memungkinkan untuk melakukan korupsi pada level local karena memberikan pertimbangan politikus local dan birokrat yang dapat diakses dan peka terhadap kelompok bunga local. Oates juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi ekonomi yang kemudian berkaitan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi. Perbelanjaan infrastruktur dan sector social oleh pemerintah daerah lebih memacu pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan ekonomi pemerintahan pusat. Menurutnya daerah memiliki kelebihan dalam membuat anggaran pembelanjaan sehingga lebih efisien dengan memusatkan kepada kebutuhan masyarakat karena lebih mengetahui keadaannya.

G. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

1. Hasil uji Hipotesis 1 adalah diterima karena t hitung > t tabel maka ada pengaruh yang positif antara pertumbuhan industri terhadap penyerapan tenaga kerja.
2. Hasil uji Hipotesis 2 adalah diterima karena t hitung > t tabel maka ada pengaruh yang positif antara desentralisasi fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja
3. Hasil uji Hipotesis 3 adalah diterima karena F hitung > F tabel bahwa ada pengaruh pertumbuhan industri dan desentralisasi fiskal terhadap penyerapan tenaga kerja.

2. Saran dan Keterbatasan

Saran :



1. Pemerintah wajib Mendorong sektor industri untuk lebih meningkatkan kegiatan agar dapat memacu dan mendukung laju pertumbuhan sektor industry yang akan berdampak dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini harus didukung oleh semakin meningkatnya investasi yang masuk di Provinsi Jawa Barat.
2. Mengoptimalkan kebijakan desentralisasi fiskal melalui penerimaan daerah dengan mengoptimalkan penggunaannya untuk pembangunan perekonomian daerah sehingga dapat menyerap tenaga kerja dengan maksimal.
3. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja perlu dilakukan, misalnya dengan cara meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, atau menerapkan standar pelayanan minimal dalam urusan ketenaga kerjaan. Karena alokasi dalam bidang ketenagakerjaan semakin meningkat dari tahun ke tahun.
4. Perlu adanya payung hukum yang jelas yang melindungi tenaga kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan pusat, dan regulasi tersebut harus dapat diterapkan di industry baik di daerah ataupun di kota.

Keterbatasan :

Dalam penelitian ini terbatas pada industry secara umum tidak dipisahkan industry formal dan non formal untuk penelitian selanjutnya diharapkan meneliti pengaruh industry formal dan non formal.

H. Daftar Pustaka

- Agista, Retno. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*. Volume 4. No.3.
- Almulaibari, Hilal. 2011. *Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal Tahun 2004- 2008* [Penelitian ilmiah]. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang,
- Arifatul Chusna. 2013. Pengaruh LAju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, Dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Provinsi Jawa Tengah TAahun 1980-2011. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. UNES.
- Arsyad, Lincollin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Arsyad, Lincollin. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2010. [BPS] Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik *Provinsi Jawa Barat* , 2011.
- Badan Pusat Statistik *Provinsi Jawa Barat* , 2013.
- Badan Pusat Statistik *Provinsi Jawa Barat* , 2014.
- Badan Pusat Statistik *Provinsi Jawa Barat* , 2015.
- Badan Pusat Statistik *Provinsi Jawa Barat* , 2016.
- Dirgantoro, Muhammad Arief. 2009. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Transformasi Ekonomi Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. Volume 5. Hal. 1-9.
- Herawati, Yoyok. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*. Volume 5. No 1.
- Karib, Abdul. 2012. Analisis Pengaruh Produksi, Investasi, dan Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. Vol. 3, No. 3.

- Kharisma, Bayu. 2013. Desentralisasi fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah era Desentralisasi fidkal Di Indonesia. *Jurnal ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol. 14, No.2, Hal. 101-119.
- Kustanto, Heru, Rina Oktaviani, Bonar M. Sinaga, dan Muhammad Firdaus. 2012. Reindustrialisasi Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Makro Serta Kinerja Sektor Industri Di Indonesia. *Jurnal Riset Industri*. Vol.VI, No.1, Hal.97-115.
- Misbach, Muzamil. 2011. Pengertian Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja. (<http://economicsjurnal.blogspot.com/2011/12/pengertian-tenagakerja-dan-angkatan.html> diakses 15 Mei 2017).
- Permata Indah, sisca. 2011. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap PDRB, Tenaga Kerja dan Kemiskinan Di Jawa Barat. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Putra, Ryki Eka. 2012. Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, Dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. ISSN 2252-6560. Hal. 43-58.
- Purnomo, Didit dan Devi Istiqomah. 2008. Analisis Peranan Sektor Industri Terhadap Perekonomian Jawa Tengah Tahun 200 dan Tahun 2004 (Analisis Input output). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.9, NO.2, Hal.137-155.
- Rindayati, Wiwiek, M Parulina Hutagalon, dan Hermanto Siregar. 2007. Dampak Desentralisasi Terhadap Kinerja Fiskal Daerah Dan Ketahanan Pangan Di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Vol 4. No 2. PP.103-117.
- Sasana, Hadi. 2011. Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 15. No.1 hal 46-58. ISSN: 1412-3126.
- Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.10, NO.1, Hal.103-124.
- Nardi Sunardi, E. A., Kadim, A., Tumanggor, M., & Oktrima, B. (2018). Effects Of The Bank Soundness With The Rbbr Approach (Risk Base Bank Rating) Of Cost Efficiency And Its Implications On Sharia Bank Performance In Indonesia For The Period Of 2012–2016. *International Journal of Economic Research*, 15(1).
- Sunardi, N. (2019). Analisis Risk Based Bank Rating (RBBR) Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia. *JIMF (jurnal ilmiah manajemen forkamma)*, 1(2).
- Sunardi, N., & Ula, L. N. R. (2017). Pengaruh BI Rate, Inflasi Dan Kurs Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). *Jurnal Sekuritas*, 1(2), 27.
- Tarigan, Robinson, *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara, Cetakan Keempat, Jakarta, 2005, *Ekonomi Regional*.
- Teguh, Muhammad. 2010. *Ekonomi Industri*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. *Nota Keuangan dan RAPBN 2011*
- Todoaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todoaro M.P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Yusuf, Rohaila. 2011. Perkembangan Industri Nasional dan Peran Penanaman Modal Asing. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*. Vol.8, No. 1.